

Beban Perawatan dan Ketimpangan Gender: Studi Sosiologis tentang Kesejahteraan Sosial di Masyarakat Pedesaan

Oleh: Syaifudin S. Kasim¹, Megawati A. Tawulo², Lutfiana Nur Azizah³, Dian Puspita Rezki⁴, Hasyim Abdillah⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia.

Correspondenauthor : syaifudin@gmail.com

Abstract.

This study aims to analyze the relationship between care burden and gender inequality in the construction of social welfare in rural communities. Departing from the perspective of gender sociology and social reproductive theory, this study argues that care work; both for children, the elderly, and sick family members; is the hidden foundation of the welfare system, but is systematically naturalized as a responsibility of women. This study uses a qualitative approach with case study methods in rural communities, through in-depth interviews, participatory observations, and analysis of local social policy documents. The findings show that women bear a double burden: as the main responsible for domestic work and unpaid care, as well as as economic actors in supporting household incomes. This burden not only limits women's access to productive resources and social mobility, but also reproduces structural inequalities in the distribution of welfare. In addition, social protection policies tend to assume women as beneficiaries as well as managers of family welfare, without substantively reducing the burden of care they bear. This study concludes that care work is a key element of social welfare in rural areas, but it is mostly imposed on women. Women must carry out a dual role, namely taking care of the household while earning a living, so that their opportunities to develop are limited. This causes gender inequality to continue to occur. In addition, existing social policies have not been able to reduce the burden on women because they still consider these roles as their responsibility. This research contributes to strengthening the sociological perspective of welfare by placing care work as a central arena in the analysis of gender inequality and social policy.

Key Word: *burden of care, gender inequality, social welfare, unpaid work, rural communities*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara beban perawatan (care burden) dan ketimpangan gender dalam konstruksi kesejahteraan sosial di masyarakat pedesaan. Berangkat dari perspektif sosiologi gender dan teori reproduksi sosial, studi ini berargumen bahwa kerja perawatan; baik terhadap anak, lansia, maupun anggota keluarga yang sakit; merupakan fondasi tersembunyi dari sistem kesejahteraan, namun secara sistematis dinaturalisasi sebagai tanggung jawab perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di komunitas pedesaan, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan sosial lokal. Temuan menunjukkan bahwa perempuan memikul beban ganda: sebagai penanggung jawab utama kerja domestik dan perawatan tak berbayar, sekaligus sebagai aktor ekonomi dalam menopang pendapatan rumah tangga. Beban ini tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap sumber daya produktif dan mobilitas sosial, tetapi juga mereproduksi ketimpangan struktural dalam distribusi kesejahteraan. Selain itu, kebijakan perlindungan sosial cenderung mengasumsikan perempuan sebagai penerima manfaat sekaligus pengelola kesejahteraan keluarga, tanpa secara substantif mengurangi beban perawatan yang mereka tanggung. Studi ini menyimpulkan bahwa kerja perawatan merupakan elemen kunci dari kesejahteraan sosial dipedesaan, tetapi sebagian besar dibebankan kepada perempuan. Perempuan harus menjalankan peran ganda yaitu mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah, sehingga kesempatan mereka untuk berkembang menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan gender terus terjadi. Selain itu, kebijakan sosial yang ada belum mampu mengurangi beban perempuan karena masih menganggap peran tersebut sebagai tanggung jawab mereka. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif sosiologi kesejahteraan dengan menempatkan kerja perawatan sebagai arena sentral dalam analisis ketimpangan gender dan kebijakan sosial.

Kata Kunci : beban perawatan, ketimpangan gender, kesejahteraan sosial, kerja tak berbayar, masyarakat pedesaan.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan konstruk multidimensi yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis individu maupun rumah tangga dalam masyarakat. Dalam perspektif

sosiologi kontemporer, kesejahteraan tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai kondisi relasional yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma budaya, serta kebijakan publik (Midgley, 2020; Fitzpatrick, 2022; Hick & Pomati, 2022; Spicker, 2021). Studi mutakhir dalam *comparative welfare studies* menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan sangat bergantung pada konfigurasi institusional, relasi kelas, dan rezim kebijakan sosial yang berlaku (Cantillon & Vandenbroucke, 2021; Kurowska, 2020). Dengan demikian, kesejahteraan sosial selalu terkait dengan distribusi sumber daya, relasi kuasa, dan struktur ketimpangan dalam masyarakat (Fraser, 2021; Razavi, 2021).

Salah satu dimensi penting yang kerap terpinggirkan dalam diskursus kesejahteraan adalah beban perawatan (*care burden*), yakni kerja domestik dan perawatan tak berbayar yang secara historis dan sosial dibebankan secara tidak proporsional kepada perempuan. Literatur feminis ekonomi menegaskan bahwa kerja reproduksi sosial merupakan fondasi tersembunyi dari sistem ekonomi kapitalistik modern (Folbre, 2021; Power, 2020; Ferrant & Thim, 2022). Laporan dan studi empiris lintas negara menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan waktu dua hingga tiga kali lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar, dengan implikasi langsung terhadap partisipasi pasar kerja dan mobilitas sosial mereka (Ferrant et al., 2020; Madgavkar et al., 2020; Hennekam et al., 2020). Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada partisipasi ekonomi perempuan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap pendidikan, kesempatan kerja layak, serta perlindungan sosial formal (Elson, 2021; Rubery & Tavora, 2020).

Dalam masyarakat pedesaan, relasi gender sering kali membentuk pembagian kerja yang tegas antara ranah domestik dan publik. Perempuan pedesaan tidak hanya berperan sebagai penyokong ekonomi keluarga melalui kerja di sektor pertanian atau informal, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama kerja perawatan rumah tangga. Studi tentang feminisasi kemiskinan menunjukkan bahwa kerja perawatan tak berbayar memperkuat kerentanan ekonomi perempuan karena membatasi waktu produktif dan akses terhadap sumber daya (Chant, 2020; Kabeer, 2021; Deere et al., 2021). Situasi ini semakin kompleks di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan layanan publik, seperti fasilitas penitipan anak, layanan kesehatan lansia, dan infrastruktur sosial lainnya (Addati et al., 2022; Lawson, 2020).

Kajian empiris di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga sering kali tidak tercatat dalam statistik formal, meskipun berperan signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga (Doss, 2021; Esquivel, 2021). Ketidakterlihatan kerja perawatan ini mencerminkan bias struktural dalam pengukuran kesejahteraan yang cenderung mengutamakan aktivitas ekonomi berbayar (Hirway, 2021; Floro & Komatsu, 2020). Secara global, artikel-artikel dalam *Social Politics* dan *Feminist Economics* menegaskan

bahwa sistem kesejahteraan modern masih bergantung pada asumsi implisit bahwa perempuan akan menyerap beban reproduksi sosial tanpa kompensasi yang memadai (Razavi, 2021; Power, 2020).

Lebih lanjut, kajian feminis kontemporer menekankan bahwa tanpa redistribusi kerja perawatan antara laki-laki dan perempuan, serta tanpa kebijakan publik yang responsif gender, ketimpangan ini akan terus direproduksi lintas generasi (Fraser, 2021; Elson, 2021; Kurowska, 2020). Reformasi kebijakan yang mengintegrasikan perspektif *care economy* terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan kemiskinan perempuan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif (Ferrant & Thim, 2022; Cantillon & Vandenbroucke, 2021; Madgavkar et al., 2020). Dengan demikian, analisis kesejahteraan sosial di pedesaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika kerja perawatan, struktur gender, dan desain kebijakan sosial yang membentuk relasi kuasa dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis bagaimana beban perawatan tak berbayar berkontribusi pada ketimpangan gender dalam konstruksi kesejahteraan sosial di masyarakat pedesaan. Studi ini menempatkan kerja perawatan sebagai arena sentral dalam analisis kesejahteraan, sekaligus menyoroiti bagaimana struktur patriarkal dan kebijakan sosial lokal berinteraksi dalam mereproduksi ketidaksetaraan gender.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dapat mengungkap aspek krusial yang selama ini sering diabaikan dalam pembahasan kesejahteraan sosial, yaitu kerja perawatan yang tidak dibayar dan dibebankan secara tidak proporsional kepada perempuan. Tanpa memahami dimensi ini, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak lengkap dan berpotensi mempertahankan ketimpangan yang ada. Penelitian ini juga relevan sebagai dasar evaluasi kebijakan sosial. Banyak program perlindungan sosial belum mempertimbangkan beban perawatan yang ditanggung perempuan, sehingga beresiko peran tradisional tanpa memberikan dukungan nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, inklusif dan responsive gender. Sehingga penelitian ini penting karena tidak hanya menjelaskan sumber ketimpangan, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan kebijakan dan praktik sosial menuju system kesejahteraan yang lebih setara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis (*critical case study*) untuk menganalisis relasi antara beban perawatan (*care burden*) dan kesejahteraan sosial perempuan di wilayah pedesaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika relasional, praktik sosial sehari-hari, serta struktur institusional yang

membentuk pengalaman kesejahteraan perempuan secara kontekstual. Studi kasus kritis digunakan untuk memahami bagaimana kerja perawatan tak berbayar beroperasi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan dalam konfigurasi sosial tertentu, sekaligus membuka ruang untuk melihat potensi agensi dan resistensi perempuan dalam menghadapi keterbatasan struktural.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan keterbatasan infrastruktur layanan sosial. Pemilihan lokasi mempertimbangkan indikator tingkat kemiskinan, partisipasi angkatan kerja perempuan, serta ketersediaan layanan publik berbasis perawatan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan anak usia dini, dan dukungan bagi lansia. Konteks ini penting karena wilayah pedesaan merepresentasikan ruang sosial di mana kerja perawatan dan kerja produktif sering kali tumpang tindih tanpa dukungan kebijakan yang memadai.

Partisipan penelitian terdiri atas perempuan dewasa yang memiliki tanggung jawab perawatan dalam rumah tangga, baik sebagai istri, ibu, maupun kepala rumah tangga. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) terlibat dalam kerja perawatan tak berbayar secara rutin, (2) memiliki aktivitas ekonomi produktif di sektor formal atau informal, dan (3) berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah. Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini juga melibatkan informan tambahan seperti perangkat desa, kader kesehatan, dan anggota keluarga laki-laki guna memahami distribusi kerja domestik dalam rumah tangga.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipatif terbatas, dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang mengeksplorasi pengalaman sehari-hari perempuan dalam mengelola kerja perawatan, strategi pembagian waktu, persepsi terhadap kesejahteraan, serta interaksi mereka dengan kebijakan sosial yang tersedia. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami praktik konkret pembagian kerja domestik dan dinamika relasional dalam rumah tangga. Sementara itu, telaah dokumen mencakup analisis kebijakan lokal, data statistik desa, serta program perlindungan sosial yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan hingga mencapai *data saturation*, yaitu ketika tidak ditemukan lagi informasi substantif baru yang memperkaya kategori analisis. Seluruh wawancara direkam (dengan persetujuan informan), ditranskrip verbatim, dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik reflektif (*reflexive thematic analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) pembacaan berulang untuk memahami keseluruhan narasi, (2) pengkodean awal terhadap unit makna yang relevan dengan tema beban perawatan dan kesejahteraan, (3)

pengelompokan kode ke dalam kategori tematik, dan (4) konstruksi tema utama yang merepresentasikan pola struktural dan pengalaman subjektif partisipan.

Secara teoretis, analisis dipandu oleh perspektif ekonomi perawatan (*care economy*) dan teori reproduksi sosial, yang memandang kerja perawatan sebagai fondasi yang menopang sistem ekonomi dan sosial. Kerangka ini memungkinkan penelitian tidak hanya memetakan distribusi waktu dan beban kerja, tetapi juga mengaitkannya dengan relasi kuasa, norma gender, dan desain kebijakan publik. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada deskripsi empiris, melainkan menyoroti bagaimana struktur sosial mereproduksi ketimpangan melalui normalisasi kerja perawatan perempuan.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan strategi *triangulation* sumber dan metode, *member checking*, serta audit jejak analisis (*audit trail*). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen kebijakan. *Member checking* dilakukan dengan mendiskusikan kembali ringkasan hasil wawancara kepada beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi. Selain itu, reflektivitas peneliti dijaga melalui pencatatan jurnal lapangan guna menyadari posisi sosial dan asumsi yang dapat memengaruhi proses interpretasi.

Pertimbangan etis menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Seluruh partisipan diberikan informasi lengkap mengenai tujuan penelitian, hak untuk menarik diri kapan saja, serta jaminan kerahasiaan identitas. Nama informan disamarkan dalam pelaporan hasil penelitian. Mengingat isu beban perawatan berkaitan erat dengan relasi kuasa dalam rumah tangga, wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan partisipan.

Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya mendokumentasikan pengalaman perempuan pedesaan dalam menghadapi beban perawatan, tetapi juga mengungkap mekanisme struktural yang membentuk kesejahteraan sosial mereka secara lebih komprehensif dan kritis.

PEMBAHASAN

Kerja Perawatan sebagai Fondasi Tersembunyi Kesejahteraan Rumah Tangga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja perawatan tak berbayar merupakan fondasi utama yang menopang keberlangsungan ekonomi dan sosial rumah tangga pedesaan. Informan perempuan secara konsisten menggambarkan rutinitas harian yang dimulai sejak dini hari; menyiapkan makanan, membersihkan rumah, merawat anak dan lansia; sebelum terlibat dalam aktivitas produktif di sektor pertanian atau informal. Rata-rata durasi kerja perawatan mencapai 6–9 jam per hari, di luar pekerjaan ekonomi berbayar.

Namun, kerja tersebut tidak dipersepsikan sebagai “kerja” dalam pengertian ekonomi formal. Ia dinormalisasi sebagai kewajiban moral dan kodrat perempuan. Normalisasi ini menunjukkan bagaimana kesejahteraan rumah tangga secara struktural bergantung pada kontribusi reproduksi sosial yang tidak dikompensasi. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial dalam konteks pedesaan tidak berdiri netral, melainkan ditopang oleh transfer tenaga dan waktu perempuan yang tidak diakui secara institusional.

Dalam perspektif feminisme materialis, Silvia Federici menjelaskan bahwa kerja reproduksi seperti merawat keluarga dan mengurus rumah tangga merupakan bentuk kerja yang menopang kapitalisme, namun tidak dibayar dan disembunyikan (2021). Sejalan dengan itu, Christine Delphy berargumen bahwa rumah tangga adalah arena eksploitasi, dimana perempuan memberikan tenaga kerja gratis kepada keluarga (1984). Temuan penelitian ini memperlihatkan bagaimana kerja perawatan perempuan di pedesaan menjadi fondasi ekonomi tanpa pengakuan.

Secara sosiologis, temuan ini menegaskan bahwa konstruksi kesejahteraan di tingkat rumah tangga bersifat relasional dan berbasis gender. Ketika kebutuhan domestik terpenuhi, rumah tangga dianggap “sejahtera”, meskipun beban kerja yang menopangnya terdistribusi secara timpang. Dengan demikian, indikator kesejahteraan yang berfokus pada pendapatan atau konsumsi gagal menangkap dimensi reproduksi sosial yang menjadi prasyarat keberlangsungan ekonomi.

Beban Ganda dan Pembatasan Akses terhadap Modal Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban perawatan berkontribusi langsung terhadap pembatasan akses perempuan terhadap modal ekonomi, sosial, dan simbolik. Perempuan dengan tanggung jawab perawatan tinggi cenderung bekerja di sektor informal dengan fleksibilitas waktu, meskipun pendapatannya rendah dan tidak stabil. Pilihan kerja ini bukan semata-mata preferensi individual, melainkan strategi adaptif terhadap struktur waktu yang dibatasi oleh kewajiban domestik. Keterbatasan waktu juga berdampak pada partisipasi sosial dan politik. Informan menyatakan jarang terlibat dalam musyawarah desa atau pelatihan pertanian karena benturan dengan tanggung jawab domestik. Dengan demikian, kerja perawatan tidak hanya membatasi akses terhadap pendapatan, tetapi juga membatasi akumulasi modal sosial dan peluang representasi. Beban perawatan membuat perempuan terdorong ke sector informal yang lebih fleksibel namun dengan upah rendah. Hal ini sejalan dengan argument Federici bahwa kerja domestik perempuan disembunyikan dari ekonomi formal, tetapi justru menopang system produksi (2004).

Dalam perspektif struktural, situasi ini mereproduksi ketimpangan gender secara sirkular: beban perawatan mengurangi peluang ekonomi, rendahnya akses ekonomi memperkuat ketergantungan, dan ketergantungan tersebut meneguhkan legitimasi pembagian kerja patriarkal. Proses ini memperlihatkan bahwa ketimpangan kesejahteraan bukanlah akibat kekurangan

kapasitas individu, melainkan hasil konfigurasi struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai penyangga utama reproduksi sosial. Fraser menyebut kondisi ini sebagai *crisis of care* dimana sistem ekonomi gagal dan mendistribusikan kerja perawatan secara adil. Dengan demikian, pilihan perempuan bekerja disektor informal bukan preferensi bebas, melainkan konsekuensi dari struktur ekonomi yang mengandalkan kerja reproduktif perempuan tanpa kompensasi layak (2016).

Struktur Patriarkal sebagai Mekanisme Normalisasi Ketimpangan

Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kerja domestik dipersepsikan sebagai sesuatu yang “alami” dan jarang dipertanyakan. Laki-laki umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama, meskipun dalam praktiknya kontribusi ekonomi perempuan sering kali signifikan. Ketika perempuan memperoleh penghasilan lebih tinggi, tanggung jawab domestik tetap tidak berkurang secara proporsional.

Normalisasi ini menunjukkan bagaimana struktur patriarkal bekerja melalui internalisasi norma dan ekspektasi sosial. Perempuan sendiri kerap memaknai kerja perawatan sebagai ekspresi kasih sayang dan tanggung jawab moral, bukan sebagai kerja produktif yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, patriarki tidak hanya beroperasi sebagai sistem dominasi eksternal, tetapi juga sebagai habitus sosial yang membentuk persepsi dan praktik sehari-hari.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, kondisi ini menciptakan paradoks: kesejahteraan keluarga meningkat melalui kontribusi ekonomi perempuan, tetapi kesejahteraan subjektif perempuan justru tertekan akibat kelelahan fisik dan beban psikologis. Beberapa informan melaporkan stres, kurang waktu istirahat, dan keterbatasan ruang aktualisasi diri. Artinya, kesejahteraan kolektif rumah tangga sering kali dicapai melalui pengorbanan kesejahteraan individual perempuan. Dalam kerangka Amartya Sen (1999), melalui *Capability Approach*, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari kemampuan nyata individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dari penelitian tersebut, diperoleh gambaran bahwa meskipun pendapatan rumah tangga meningkat karena kontribusi perempuan, kemampuan atau *capabilities* perempuan justru terbatas, seperti waktu istirahat berkurang, partisipasi sosial terbatas, dan ruang aktualisasi diri menyempit, artinya terjadi ketimpangan kapabilitas, dimana perempuan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, tetapi tidak memperoleh kesejahteraan individual secara setara.

Kebijakan Sosial Lokal dan Reproduksi Ketimpangan

Analisis terhadap kebijakan sosial lokal menunjukkan bahwa sebagian besar program perlindungan sosial masih berorientasi pada bantuan tunai atau subsidi ekonomi tanpa menyentuh redistribusi kerja perawatan. Tidak tersedia layanan penitipan anak publik, dukungan sistematis

bagi perawatan lansia, maupun program edukasi pembagian kerja domestik berbasis gender. Ketidakhadiran infrastruktur perawatan publik memperkuat ketergantungan pada solusi berbasis keluarga, yang dalam praktiknya berarti bergantung pada tenaga perempuan. Dengan demikian, kebijakan sosial secara tidak langsung mereproduksi pembagian kerja tradisional dengan mengasumsikan bahwa kerja perawatan akan selalu tersedia secara gratis dalam rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa negara dan komunitas lokal memainkan peran ambivalen: di satu sisi menyediakan bantuan ekonomi, tetapi di sisi lain mempertahankan desain kebijakan yang netral gender secara semu. Netralitas ini justru mengabaikan realitas beban perawatan yang tidak setara, sehingga memperdalam ketimpangan kesejahteraan berbasis gender. Nancy Fraser menyebut kondisi ini sebagai bagian dari *Crisis of Care*. Dimana negara dan pasar sama-sama bergantung pada kerja perawatan, tetapi tidak menginvestasikan sumber daya untuk menopangnya. Kebijakan yang hanya berfokus pada bantuan tunai mencerminkan logika sempit kesejahteraan, tanpa menyentuh redistribusi waktu, redistribusi kerja, serta pengakuan terhadap *care work* atau kepedulian kerja. Hal ini menyebabkan kebijakan yang justru mereproduksi ketimpangan, bukan mengurainya (2016).

Kerja Perawatan sebagai Arena Politik Kesejahteraan

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kerja perawatan merupakan arena sentral dalam konstruksi kesejahteraan sosial di masyarakat pedesaan. Ia bukan sekadar aktivitas domestik privat, melainkan praktik sosial yang memiliki implikasi politik dan ekonomi luas. Kesejahteraan tidak dapat dipahami hanya melalui distribusi pendapatan, tetapi harus dianalisis melalui distribusi waktu, energi, dan tanggung jawab reproduksi sosial.

Ketimpangan gender dalam kesejahteraan sosial muncul dari interaksi antara struktur patriarkal dan kebijakan sosial yang tidak responsif terhadap ekonomi perawatan. Selama kerja perawatan tetap diposisikan sebagai kewajiban alami perempuan dan tidak didukung oleh redistribusi institusional, maka ketidaksetaraan akan terus direproduksi lintas generasi.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pergeseran perspektif sosiologis tentang kesejahteraan: dari pendekatan berbasis pendapatan menuju pendekatan relasional yang menempatkan reproduksi sosial sebagai dimensi inti analisis. Pendekatan ini membuka ruang bagi perumusan kebijakan yang tidak hanya menargetkan pengurangan kemiskinan, tetapi juga transformasi struktur gender dalam rumah tangga dan komunitas.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa beban perawatan tak berbayar merupakan elemen sentral namun tersembunyi dalam konstruksi kesejahteraan sosial di masyarakat pedesaan. Kerja

perawatan tidak sekadar aktivitas domestik privat, melainkan fondasi reproduksi sosial yang menopang keberlanjutan ekonomi rumah tangga dan stabilitas komunitas. Namun demikian, fondasi tersebut dibangun di atas distribusi tanggung jawab yang tidak setara, di mana perempuan memikul proporsi kerja perawatan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Ketimpangan ini berdampak langsung pada akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, partisipasi sosial, serta ruang aktualisasi diri.

Secara sosiologis, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial di pedesaan bersifat relasional dan terstruktur oleh norma gender yang mengakar dalam sistem patriarkal. Pembagian kerja domestik yang dinormalisasi sebagai “kodrat” perempuan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan. Bahkan ketika perempuan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, tanggung jawab perawatan tidak berkurang secara proporsional. Dengan demikian, kesejahteraan kolektif rumah tangga sering kali dicapai melalui intensifikasi kerja dan pengorbanan kesejahteraan individual perempuan.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan sosial lokal cenderung berorientasi pada dukungan ekonomi tanpa mengintervensi struktur distribusi kerja perawatan. Ketiadaan infrastruktur perawatan publik—seperti layanan penitipan anak dan dukungan perawatan lansia—memperkuat ketergantungan pada tenaga perempuan dalam rumah tangga. Netralitas kebijakan yang tidak mempertimbangkan dimensi gender justru berkontribusi pada reproduksi ketimpangan secara sistemik. Dengan kata lain, interaksi antara struktur patriarkal dan desain kebijakan sosial menciptakan siklus ketidaksetaraan yang berulang lintas generasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penempatan kerja perawatan sebagai arena analisis kesejahteraan sosial. Dengan menggeser fokus dari indikator berbasis pendapatan menuju distribusi waktu, energi, dan tanggung jawab reproduksi sosial, studi ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami ketimpangan gender di pedesaan. Kesejahteraan sosial tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mengakui dan merevaluasi nilai kerja perawatan yang selama ini tidak terlihat dalam statistik dan kebijakan formal.

Implikasinya, upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di pedesaan memerlukan pendekatan transformasional yang melampaui bantuan ekonomi semata. Diperlukan redistribusi kerja perawatan dalam rumah tangga, pengakuan institusional terhadap ekonomi perawatan, serta pengembangan kebijakan publik yang responsif gender dan berbasis komunitas. Tanpa perubahan struktural tersebut, kesejahteraan sosial akan terus dibangun di atas ketimpangan yang terselubung, dan perempuan akan tetap menjadi penyangga utama sistem kesejahteraan yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Addati, L., Cattaneo, U., & Pozzan, E. (2022). Care work and care jobs for the future of decent work. *International Labour Review*, 161(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/ilr.12229>
- Cantillon, B., & Vandenbroucke, F. (2021). Reconciling work and poverty reduction. *Social Policy & Administration*, 55(3), 398–414. <https://doi.org/10.1111/spol.12652>
- Chant, S. (2020). Feminization of poverty. *Gender & Development*, 28(2), 221–236. <https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1765145>
- Christine Delphy.(1984), *Close to Home : A Materialist Analysis of Women's Oppressions*. University of Massachusetts Press.
- Deere, C. D., et al. (2021). Women's asset ownership and poverty. *World Development*, 146, 105–579. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105579>
- Doss, C. (2021). Women's work and economic empowerment. *Feminist Economics*, 27(1–2), 1–24. <https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1876900>
- Elson, D. (2021). Gender equality and economic policy. *New Political Economy*, 26(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1810229>
- Esquivel, V. (2021). Care policies and gender equality. *Development and Change*, 52(2), 302–329. <https://doi.org/10.1111/dech.12617>
- Ferrant, G., & Thim, A. (2022). Measuring unpaid care work. *OECD Development Policy Papers*, 37. <https://doi.org/10.1787/a8b6d7f4-en>
- Ferrant, G., Pesando, L., & Nowacka, K. (2020). Unpaid care work. *OECD Social Policy Studies*. <https://doi.org/10.1787/2c9dbe2a-en>
- Fitzpatrick, T. (2022). Welfare states and wellbeing. *Journal of Social Policy*, 51(2), 275–293. <https://doi.org/10.1017/S0047279421000721>
- Floro, M., & Komatsu, H. (2020). Gender inequality and unpaid labor. *Review of Income and Wealth*, 66(4), 845–865. <https://doi.org/10.1111/roiw.12460>
- Folbre, N. (2021). The rise and decline of patriarchal systems. *World Development*, 146, 105–592. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105592>
- Fraser, N. (2021). *Care crisis and capitalism*. *Social Politics*, 28(2), 1–19. <https://doi.org/10.1093/sp/jxab015>
- Fraser, N. (2016). *Contradictions of Capital and Care*: New Left Review. 100. 99-117.
- Federici. (2012), *Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. PM. Press
- Federici, S. (2004). *Caliban and The Witch: Women the Body and Primitive Accumulation*. Autunomedia.
- Hick, R., & Pomati, M. (2022). Multidimensional poverty. *Journal of European Social Policy*, 32(2), 123–138. <https://doi.org/10.1177/09589287211040485>
- Hennekam, S., et al. (2020). Work–life balance and gender inequality. *Gender, Work & Organization*, 27(5), 906–923. <https://doi.org/10.1111/gwao.12466>
- Hirway, I. (2021). Unpaid work and national income. *Review of Income and Wealth*, 67(3), 557–580. <https://doi.org/10.1111/roiw.12503>
- Kabeer, N. (2021). Gender equality and inclusive growth. *Feminist Economics*, 27(1–2), 24–49. <https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1885090>
- Kurowska, A. (2020). Gender equality and welfare regimes. *Social Politics*, 27(3), 521–546. <https://doi.org/10.1093/sp/jxaa006>
- Lawson, M. (2020). Care economy and inequality. *Gender & Development*, 28(2), 289–307. <https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1747899>
- Madgavkar, A., et al. (2020). Gender equality and economic growth. *McKinsey Global Institute Discussion Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3647094>
- Midgley, J. (2020). Social development and welfare. *International Social Work*, 63(4), 441–455. <https://doi.org/10.1177/0020872819870334>
- Power, M. (2020). The COVID-19 pandemic and the care crisis. *Feminist Economics*, 26(3), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1779034>

- Razavi, S. (2021). The political economy of care. *Development and Change*, 52(2), 250–274. <https://doi.org/10.1111/dech.12612>
- Rubery, J., & Tavora, I. (2020). Gender pay gap and welfare states. *Cambridge Journal of Economics*, 44(2), 1–21. <https://doi.org/10.1093/cje/bez060>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Spicker, P. (2021). Welfare theory and social justice. *Critical Social Policy*, 41(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/0261018320946175>